

# TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI SOSIAL: SUATU PENDEKATAN BUDAYA

Irwan Abdullah\*

... pemahaman kebendaan dan kuantitatif saja sudah tidak memadai lagi. Pembangunan seperti itu belum tentu menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan, bahkan ternyata dapat membawa dampak sosial budaya yang kurang menguntungkan.... Manusia terasa banyak yang kehilangan pegangan hidup (Soeharto).<sup>1</sup>

## Pendahuluan

**E**mpat puluh delapan tahun yang lalu, jauh sebelum Orde Baru dimulai, Soedjatmoko menerbitkan sebuah tulisan tentang "pembangunan sebagai masalah kebudayaan"<sup>2</sup>. Bagi Soedjatmoko, "pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya" (1983:21). Pembangunan itu selalu menyangkut perubahan persepsi dan sikap terhadap kehidupan secara menyeluruh, tidak di dalam bagian-bagian yang terpisah. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan ekonomi selalu menyangkut faktor nonekonomi di dalamnya. Pandangan Soedjatmoko tentang kaitan pembangunan ekonomi dengan proses perubahan secara luas dapat dilihat pada tanggapannya terhadap proses industrialisasi.

... pemasukan mesin-mesin hanya merupakan permulaan proses per-

ubahan sosial dan tanggapan jiwa bangsa kita. Baru sesudah kita menyesuaikan cara-cara organisasi kerja, disiplin kerja, kecepatan hidup kita, dan sebagainya di samping kecakapan kita untuk menggunakan mesin itu, dapat kita katakan bahwa mesin itu sudah menjadi barang yang hidup dalam masyarakat kita. Malahan lebih jauh lagi, kita baru dapat dikatakan telah mencernakan mesin itu, sesudah pada kita timbul keinginan dan kesanggupan, tidak saja untuk memelihara mesin itu, melainkan untuk membuatnya sendiri, dan untuk senantiasa menciptakan mesin-mesin yang lebih baik daripada yang sudah, yang lebih sesuai lagi dengan kebutuhan kita sendiri. Nyatalah bahwa mesin itu hanya pernyataan dan alat suatu masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kita tidak dapat melepaskan mesin itu serta teknologi umumnya dari nilai-nilai sesuatu masyarakat, dari segala sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat itu. Dengan perkataan lain mesin serta teknologi merupakan penjelmaan

\* Doktor, Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

1 Pidato Presiden Soeharto pada pembukaan Kongres VI dan Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, Yogyakarta, 16 Juli 1990 (lihat Effendi *et al.*, 1990: xv).

2 Tulisan Soedjatmoko itu, "Pembangunan sebagai Masalah Kebudayaan", diterbitkan pertama kali dalam majalah *Konfrontasi* No. 22, 1954 yang kemudian diterjemahkan dalam seri terjemahan "Modern Indonesia Project", Cornell University, 1958. Tulisan ini menjadi bab pertama dalam kumpulan karangan yang berjudul *Dimensi Manusia dalam Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1983).

kebudayaan suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang menciptakannya.

(Soedjatmoko, 1983:6).

Meskipun proses membangun suatu masyarakat harus mengubah masyarakat itu ke arah yang sesuai dengan cita-cita pembangunan, transformasi suatu masyarakat berkaitan langsung dengan ciri sosial budaya masyarakat tersebut.

Kita dapat melihat tiga pokok pikiran dari kutipan pandangan Soedjatmoko di atas. Pertama, proses pembangunan suatu masyarakat membutuhkan suatu proses transformasi sosial<sup>3</sup> untuk membentuk kesiapan masyarakat dalam menerima benda (teknologi, misalnya) dan nilai-nilai baru yang melekat di dalamnya. Proses transformasi sosial di sini merupakan titik awal dari penyesuaian-penyesuaian dalam proses peningkatan kemampuan pencapaian tujuan masyarakat secara umum. Kedua proses transformasi di dalam suatu masyarakat, sesungguhnya, merupakan proses yang berkelanjutan, yang bertujuan membangun basis kekuatan yang mendukung proses pembangunan. Ketiga, kalau teknologi dianggap sebagai alat untuk mencapai kepentingan manusia, teknologi itu harus tidak mendikte kehidupan manusia.

Dari pandangan ini kita perlu memikirkan kembali posisi kebudayaan sebagai model bagi tindakan-tindakan manusia. Sebagai model, kebudayaan menjadi sesuatu yang tidak hanya mampu menjelaskan realitas kehidupan, tetapi juga—seperti ditegaskan oleh Alfian (1982:18)—kebudayaan menjadi

unsur utama dalam proses pembangunan diri manusia dan masyarakat. Seperti halnya Soedjatmoko, Alfian menekankan fungsi kebudayaan sebagai acuan nilai dalam menjangkau unsur-unsur baru yang relevan bagi pembangunan manusia di dalam proses transformasi sosial. Apalagi jika disepakati bahwa pembangunan ekonomi, sesungguhnya, adalah pembangunan manusia yang seharusnya dilakukan oleh manusia (Korten, 1988: 376).

Sejalan dengan pandangan di atas, dapat dilihat tiga proses di mana kebudayaan mengambil tempat yang sangat penting di dalamnya. Pertama, kebudayaan merupakan faktor penting di dalam mendorong proses transformasi. Kedua, kebudayaan sekaligus dinilai sebagai penghambat proses transformasi karena nilai-nilai yang dimilikinya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dan praktik kehidupan baru. Ketiga, kebudayaan harus pula dilihat sebagai produk dari suatu proses transformasi di mana ia diproduksi dan direproduksi di dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini berusaha membahas ketiga posisi kebudayaan tersebut dan ingin menunjukkan skenario yang perlu dilakukan di dalam proses transformasi masyarakat ke fase berikutnya.

### **Kebudayaan sebagai Pendorong Transformasi Sosial**

Kebudayaan dapat ditanggapi sebagai alat yang melayani proses pembangunan sehingga kebudayaan harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan pembangunan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar betapa kebudayaan

3 Transformasi suatu masyarakat harus mengandung tiga agenda. Pertama, transformasi bersifat analitis. Sifat ini mengacu kepada kualitas abstrak tentang struktur sosial dan proses perubahannya. Secara analitis, proses ini bersifat universal, baik dari segi ruang maupun waktu. Dalam hal ini transformasi mengandung pengertian terjadinya peningkatan kompleksitas sosial suatu masyarakat. Kedua, sifat historis. Proses ini menunjukkan periode waktu tertentu yang dalam satuan waktu tersebut dapat dilihat ciri-ciri baru di dalam suatu masyarakat. Ketiga, sifat praktis dari transformasi yang serangkaian kebijakan dirumuskan untuk pembangunan kompleksitas masyarakat. Dalam ketiga orientasi ini kebudayaan dapat ditempatkan pada posisi yang berbeda. Dalam orientasi ketiga, misalnya, kebudayaan lebih merupakan infrastruktur yang memungkinkan transformasi terjadi dan sekaligus sebagai objek yang dikenai proses transformasi. Sebagai infrastruktur, kebudayaan bersifat melayani.

tradisional dan tentu saja orang-orang yang tradisional merupakan kendala pembangunan. Hal ini mengandung pengertian bahwa kendala-kendala semacam itu harus dihapuskan. Kebudayaan dapat dianggap sebagai suatu modal dasar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Ide gotong royong dapat dikembangkan untuk kepentingan mobilisasi tenaga kerja di dalam membangun sesuatu dan dalam menggalang pemupukan modal untuk membiayai pembangunan. John Bowe telah memperlihatkan pemanfaatan sistem gotong royong pada era Soekarno dan Soeharto untuk mendukung pembangunan kedua rezim itu dengan cara yang berbeda (Bowen, 1986). Dalam hal ini, kebudayaan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga ia betul-betul menjadi ideologi umum untuk menyukseskan pembangunan.

Mengikuti tradisi berpikir Weber, kebudayaan suatu masyarakat dapat menjadi kekuatan penting yang mengubah tata ekonomi masyarakat ke arah kemajuan, seperti terbukti dari peran kebudayaan di kalangan Calvinis. Kepercayaan terhadap "orang terpilih" dalam kosmologi Calvinis telah membangkitkan semangat kerja yang terus-menerus untuk memastikan apakah seseorang terpilih atau tidak. Kepastian tentang keselamatannya hanya dapat dilihat di dalam keberhasilan di dunia (Weber, 1930). Keyakinan semacam ini ditunjukkan oleh Weber sebagai kekuatan yang besar di dalam memunculkan organisasi kerja dan dalam mengatur perilaku ekonomi.

Masih dalam tradisi yang sama, Robert Bellah telah menunjukkan bahwa agama Tokugawa merupakan sumber inspirasi penting di dalam tindakan ekonomi masyarakat Jepang, yang kemudian melahirkan revolusi ekonomi (Bellah, 1992). Di dalam masyarakat kita, agama telah pula menjadi pendorong penting pada tahap awal proses modernisasi ekonomi di berbagai tempat, terutama pada saat perdagangan menjadi bagian dari penyebaran agama di daerah-daerah pesisir Jawa (Groeneveldt, 1960; Meilink-Roelofs, 1996; Drewes, 1968; van

Leur, 1983). Meskipun kekuatan agama ini melemah setelah Belanda masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17, agama tetap memiliki arti penting, terutama dalam mengendalikan berbagai tindakan pemerintah kolonial (Breman, 1983; Kuntowijoyo, 1987).

Beberapa ahli telah menunjukkan etika agama ini sebagai kekuatan penting di dalam proses transformasi ekonomi di berbagai tempat (Geertz, 1963; Castles, 1967; Kuntowijoyo, 1971; de Jonge, 1989; Muhaimin, 1990). Clifford Geertz, misalnya, telah melihat kemiripan semangat kapitalisme di kalangan umat Islam dengan semangat kapitalisme kaum Protestan.

*In the light of theories of Max Weber concerning the role of Protestantism in stimulating the growth of a business community in the West, it is perhaps not surprising that the leaders in the creation of such a community in Mojokuto are for the most part intensely reformist Moslems, for the intellectual role of reform in Islam has, at least in some ways, approached that of Protestantism in Christianity. Emphasizing that the systematic and untiring pursuit of worldly ends may be a religiously significant virtue of fundamental importance (Geertz, 1967:377).*

Agama dalam proses sosial dapat dipandang sebagai dasar dalam pembentukan rasionalisasi kehidupan yang memberi basis pada perkembangan ekonomi (Weber, 1978; Abdullah, 1994). Agama berfungsi sebagai motivator di dalam proses transformasi konseptual (pandangan hidup), yang secara langsung berkaitan dengan apa yang dimaksudkan Weber sebagai rasionalisasi, yakni organisasi kehidupan sosial ekonomi atas dasar prinsip-prinsip efisiensi.

Tumbuhnya rasionalisme berarti menghilangnya praktik-praktik magis (Geertz, 1963) dan spekulatif (Weber, 1978) di dalam suatu masyarakat. Hasil reformasi yang dilakukan lembaga agama, menurut Weber, adalah munculnya suatu pola kehidupan ekonomi yang konsisten, sistematis, dan etis (Weber, 1978:587). Agama telah

membantu proses sejarah peradaban dengan cara mendorong perubahan dalam orientasi nilai, yaitu dari suatu masyarakat yang masih terikat pada nilai-nilai magis ke masyarakat yang lebih berorientasi pada nilai-nilai rasional. Agama menjadi suatu kekuatan yang menghapuskan ikatan-ikatan tradisional, yang menekankan kehidupan sebagai bagian dari tatanan yang harmoni (Abdullah, 1994:173).

Interaksi kebudayaan dengan sistem kapitalisme dapat dilihat pada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh kebudayaan untuk menjadi faktor penting di dalam perubahan. Untuk itulah Geertz dengan tegas mengatakan bahwa:

*...industrialism may not necessarily involve free-enterprise capitalism, ... it does involve the decline of magic, the construction of a legal and moral code, increased social mobility, the bureaucratization of government, and the isolation of the elementary family from strong extended kinship ties (Geertz, 1963:143).*

Di sini terlihat bahwa modernisasi ekonomi membutuhkan transformasi sosial budaya yang memberikan jalan bagi perubahan-perubahan selanjutnya.

Gotong royong, misalnya, telah menjadi faktor penting di dalam transformasi masyarakat karena institusi ini mengandung pengertian tentang akumulasi modal dan tenaga yang kemudian menjadi kekuatan gabungan di dalam setiap perubahan yang dilakukan bersama. Gotong royong di berbagai tempat telah digunakan secara berlainan pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, di mana transformasi gotong royong pada masa Orde Baru telah menjadi institusi pemerintah di dalam menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan (Bowen, 1986). Meskipun demikian, gotong royong dapat menjadi faktor penghambat di dalam berbagai proses pembangunan. Pranata ini, seperti ditunjukkan oleh Sairin (1991), dapat menjadi dasar bagi pembentukan nepotisme yang melemahkan kendali terhadap sepak terjang aparat pemerintahan.

Dalam hal ini, peranan kebudayaan secara luas lebih bersifat internal, yakni pengembangan ciri-ciri lokal yang mendukung proses perubahan secara luas. Sesuatu yang dilakukan kebudayaan adalah melicinkan jalan bagi proses pembangunan sehingga ia lebih bersifat melayani perubahan. Kebudayaan dalam konteks ini tidak memiliki posisi sebagai faktor evaluatif, yang menilai perubahan dari paradigma kebudayaan. Dapat pula dikatakan bahwa paradigma kebudayaan di dalam melihat proses perubahan terletak pada nilai-nilai kolektif yang menjadi basis dari pembentukan institusi-institusi sosial, yang kemudian berorientasi kepada proses transformasi karena pada dasarnya masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Persoalan yang muncul adalah sifat-sifat suatu kebudayaan dengan sendirinya dapat mendukung dan mendorong proses perubahan. Bagaimanapun, usaha perubahan suatu masyarakat menyangkut penerimaan unsur-unsur baru di dalam kehidupan. Unsur-unsur baru ini tidak selamanya dapat diterima dengan mudah. Dalam hal ini, tidak dapat dihindari untuk mengasumsikan bahwa masyarakat itu sendiri mengalami dinamika secara internal, di mana dia melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam interaksinya dengan ide-ide dan praktik kehidupan baru. Hal ini tidak sepenuhnya dipahami, terutama karena analisis yang meluas tentang peranan kebudayaan dalam proses modernisasi ekonomi, misalnya, tidak tersedia. Penelitian mengenai masalah ini, seperti telah dibicarakan sebelumnya, hanya menyentuh bagian kecil dari diskusi kebudayaan, yakni berkisar pada kedudukan agama di dalam proses perubahan sosial dan modernisasi ekonomi. Untuk itu pula, pembicaraan mengenai kebudayaan sebagai faktor yang menghambat transformasi perlu dibicarakan.

### **Hambatan Budaya dalam Pembangunan**

Istilah transformasi sosial menunjuk kepada suatu proses pergantian (perbedaan) ciri-ciri (identitas) sosial dalam satuan waktu tertentu (Nisbett, 1972:3). Proses ini

mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi karena dengan perbedaan kita dapat melihat perwujudan sebuah proses transformasi. Sesuatu yang telah mengalami proses transformasi dapat dilihat dari perbedaan wujud sesuatu. *Kedua*, konsep ciri atau identitas merupakan acuan di dalam suatu proses transformasi. Kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, harus jelas perbedaan dalam hal apa: ciri-ciri sosial, ekonomi, atau ciri penampilan dari sesuatu. *Ketiga*, proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada satuan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat yang lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern di dalam satuan waktu yang berbeda (Arche dan Long, 2000).

Proses transformasi suatu masyarakat selalu menyangkut pilihan apa yang ingin diubah dan apa yang seharusnya tidak diubah. Perubahan secara umum mengalami pergeseran makna. Perubahannya tidak semata-mata merupakan proses pergantian unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi lebih berarti sebagai "peniruan" teknologi dan praktik kehidupan Barat. Di dalam proses peniruan itu, kebudayaan kita seolah-olah harus menyesuaikan dengan unsur baru yang diambil dari luar. Meskipun terjadi proses adaptasi kebudayaan, dalam kenyataannya suatu kebudayaan harus diubah untuk dapat menyesuaikan dan menerima unsur-unsur baru tersebut.

Dalam praktik ekonomi, aspek mentalitas yang berbeda dengan mentalitas Barat telah dilihat sebagai faktor penting yang menghambat kemajuan ekonomi. Perbedaan ini kemudian digambarkan dengan istilah ekonomi dualistis (Boeke, 1980). Konsep ini sangat mempengaruhi Geertz pada saat ia menggambarkan pembedaan antara ekonomi firma dan *bazaar* (Geertz, 1963). Bagi Geertz, ekonomi *bazaar* tidak hanya berbeda dengan ekonomi firma, tetapi ekonomi "pasar"

telah menyebabkan kemacetan-kemacetan di dalam modernisasi ekonomi ke tahap selanjutnya:

*... the few outstanding efforts by members of the old merchant class to create more efficient productive and distributive institutions in the town are nearly swamped by the hundreds of small-scale petty traders trying to squeeze a marginal living out of traditional commerce. The reconstruction of Mojokuto's economic life, like the reconstruction of her structure generally, is so far but half-begun; it remains tentative, ill-defined, seemingly unable to complete itself* (Geertz, 1963:17).

Di sini dapat dilihat bahwa Geertz mengasumsikan proses perkembangan berjalan dari ekonomi pasar ke ekonomi firma. Menurut hemat saya, ini sesungguhnya adalah transformasi dari sistem ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi modern. Kenyataannya, proses itu sama sekali tidak mudah karena membutuhkan prasyarat-prasyarat transformasi masyarakat secara luas.

Ciri-ciri internal kelompok masyarakat kita memang sejak masa kolonial telah dinilai sebagai penghambat proses modernisasi (cf. Alexander & Alexander, 1991). Pandangan yang mengatakan bahwa kaum pribumi merupakan kelompok masyarakat yang malas telah menjadi mitos di dalam menjelaskan berbagai kegagalan pribumi di berbagai bidang kehidupan (lihat Alatas, 1977). Tidak hanya dalam masyarakat kita mentalitas ini dianggap penting di dalam berbagai proses perubahan. Di banyak masyarakat dunia ketiga, hal serupa dapat ditemukan. Dalam masyarakat India, misalnya, mentalitas tradisional dinilai sebagai penghambat utama proses pembangunan, terutama menyangkut aspirasi yang terbatas di dalam penerimaan ide-ide dan praktik kehidupan yang lebih modern (Nair, 1966). Foster melalui penelitian intensif telah menunjukkan bagaimana perbedaan persepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat menjadi penghambat perubahan (Foster, 1973).

Kegagalan transformasi ke arah pembentukan sistem kehidupan modern secara luas disebabkan oleh perubahan tata nilai lama yang lamban atau pengaruh tata nilai lama di dalam bentuk organisasi kehidupan baru, yang sesungguhnya meminta suatu cara kerja organisasi yang baru. Organisasi ekonomi yang jika mengikuti etika dan prinsip ekonomi harus merupakan suatu organisasi rasional yang berorientasi pada tujuan memaksimalkan kapital, pada kenyataannya lebih bersifat organisasi sosial ketimbang organisasi ekonomi (Geertz, 1963). Ikatan-ikatan tradisional merupakan kunci dari moral ekonomi yang kemudian dilihat Evers dkk. sebagai penghambat penting kegiatan ekonomi (Evers *et al.*, 1994). Di dalam kasus organisasi politik, proses yang sama dapat diamati. Kegagalan struktur organisasi modern dalam melaksanakan pembangunan disebabkan oleh distorsi bentuk organisasi modern, di mana nilai-nilai dan struktur organisasi tradisional menyebabkan munculnya sistem patrimonial, yang antara lain tampak dalam sistem nepotisme (Effendi, 1990:420). Lebih lanjut, Sofian Effendi menunjukkan bahwa dampak penting dari sistem birokrasi dengan ciri-ciri hierarkis dan legalitas semacam ini menyebabkan munculnya kecenderungan manusia untuk "menjaga keseimbangan dan keselarasan serta kurang mementingkan perubahan dan kemajuan yang identik dengan pembangunan" (Effendi, 1990:421). Di sini nilai-nilai tradisional telah memberikan wajah lain pada suatu sistem organisasi, seperti juga dalam sistem ekonomi yang menyebabkan terhambatnya proses modernisasi ekonomi.

Kasus IDT yang sedang digalakkan oleh pemerintah sesungguhnya merupakan masalah kebudayaan, yakni masalah bagaimana program itu dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari usaha pembangunan manusia yang juga membutuhkan partisipasi manusia di dalamnya. Program pembangunan semacam ini selalu menyangkut perubahan sikap terhadap uang dan praktik organisasi yang mendukung pengelolaan dana. Asumsi bahwa mereka sudah memiliki

pengetahuan organisasi perlu dilihat pembuktiannya secara empiris karena lapisan termiskin dari sudut ekonomi cenderung merupakan lapisan yang juga terlemah dari sudut organisasi. IDT sebagai sebuah program untuk mengubah tingkat kesejahteraan, karenanya, menyangkut perubahan sistem pengetahuan dan praktik kehidupan sehari-hari. Kelanjutan program semacam ini terletak pada sejauh mana masyarakat mampu menangkap usaha baik pemerintah, seberapa besar animo penduduk miskin dapat dibangkitkan untuk berpartisipasi dalam program yang dirancang, dan apakah fasilitas-fasilitas pendukung tersedia dengan cukup. Seperti dalam banyak kasus, pihak-pihak tertentu seringkali memanipulasi program untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Untuk itu, proses transfer pengetahuan itulah yang menjadi referensi di dalam menilai sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kebudayaan harus bersifat evaluatif terhadap tindak tanduk warganya.

Aspek penilaian ini merupakan aspek penting di dalam berbagai proses perubahan karena ia akan mempertanyakan keabsahan dan mengarahkan suatu proses perubahan ke arah yang tepat. Sejalan dengan itu, masalah ini kemudian menjadi persoalan genting di mana kebudayaan sebagai faktor penilai dalam setiap proses tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana kecenderungan ini terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya merupakan persoalan diskusi berikut.

### **Kebudayaan dan Tata Nilai Baru**

Kita berada dalam fase transisi untuk memasuki era baru kehidupan yang ditandai dengan tingkat mobilitas yang semakin tinggi, perbedaan-perbedaan yang semakin mencolok, dan komunikasi yang semakin bersifat global. Di dalam globalisasi semacam ini, subjektivitas mengalami transformasi yang menyangkut persoalan nasionalisme (identitas), orientasi kebudayaan, dan tatanan sosial (Featherstone, 1990).

Globalisasi membawa dampak yang tidak terelakkan di dalam bidang konsumsi, yang merupakan tanda penting dari proses transformasi masyarakat. Demikian pula aspek simbolis dari suatu produk telah digunakan secara praktis untuk membangun hubungan-hubungan sosial. Secara umum, proses konsumsi merupakan proses di mana individu dapat melakukan negosiasi posisi sosialnya di dalam suatu masyarakat. Kecenderungan ini dapat dilihat pada cara masyarakat kota menggunakan produk global, yang merupakan alat artikulasi kelompok untuk membedakan dirinya dengan kelompok lain. Kecenderungan ini disebabkan oleh membengkaknya golongan menengah sejak tahun 1980-an (Kuntowijoyo, 1987), yang menyebabkan golongan ini menjadi golongan yang sangat berpengaruh di dalam proses reproduksi pola hidup sehari-hari.

Permintaan yang besar di dalam produk global oleh golongan menengah telah menyebabkan terjadinya ekspansi pasar secara besar-besaran, yang karena itu pasar menjadi kekuatan penting di dalam mendikte kehidupan. Fasilitas kredit yang mudah, pilihan yang bervariasi dari segi kuantitas dan kualitas, telah meningkatkan konsumsi golongan menengah. Kepentingan-kepentingan material secara umum juga telah mengarahkan perilaku sosial hampir semua orang. Georg Simmel telah menunjukkan kecenderungan ini pada saat ia mengatakan bahwa uang telah menyediakan berbagai kemungkinan bagi kehidupan individu.

*Money has moved the complete satisfaction of an individual's wishes into a much greater and more tempting proximity. It gives the possibility of obtaining at a single stroke, as it were whatever appears at all desirable. Between the human being and his wishes it inserts a mediating stage, a relieving mechanism and, because everything else becomes attainable with the acquiring of this one thing, it stimulates the illusion that all these other things are more easily obtained (Simmel, 1991:26).*

Semangat untuk memperoleh uang, karena fungsinya di dalam pembentukan sta-

tus individu, menjadi dorongan yang sangat penting bagi hampir semua orang.

Untuk inilah peringatan Presiden Soeharto bahwa orientasi materi dapat menyebabkan kerapuhan dan belum tentu dapat membawa manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan cukup beralasan. Seperti tampak pada kutipan di awal tulisan ini, pegangan hidup yang kuat harus dibangun untuk menyelamatkan manusia dari orientasi kebendaan. Pemuasan materi secara berlebihan dapat mengarah kepada proses dehumanisasi yang dapat melahirkan *the lonely crowd*. Untuk ini, Alfian menunjukkan bahwa:

...perkembangan rasio yang terutama bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan materi kadang-kadang melahirkan sifat-sifat persaingan yang tak terkendali yang muncul dalam corak-corak yang tidak berperikemanusiaan seperti penindasan manusia oleh manusia atau penghisapan manusia oleh manusia (Alfian, 1982:46).

Dalam hal ini, keseimbangan antara aspek materi dan nonmateri di dalam kehidupan harus dibangun untuk menghindari disintegrasi di dalam kehidupan sosial. Sentimen-sentimen berbeda akibat diferensiasi sosial yang meluas merupakan potensi konflik yang menghilangkan kebersamaan, di mana sesungguhnya pembangunan manusia yang merupakan bagian dari *nation building* tidak akan pernah tercapai.

Fungsi kebudayaan dalam perubahan masyarakat harus ditegaskan kembali karena keterbelakangan masyarakat selama ini bukanlah disebabkan oleh kelemahan atau kebobrokan nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan itu sendiri, melainkan karena nilai tersebut telah dikesampingkan dalam praktik kehidupan sehari-hari (Alfian, 1982:61). Kebudayaan seharusnya berfungsi dalam mengevaluasi setiap perubahan sehingga perubahan itu tidak berada di luar jalur nilai-nilai yang disepakati. Persoalan yang dihadapi adalah perubahan itu sendiri yang dimotori oleh kepentingan ekonomi (konsumsi yang menyebabkan konsume-

risme, misalnya) telah berlangsung sedemikian cepat sehingga tidak saja menyebabkan arah perubahan menjadi tidak jelas, tetapi juga menyulitkan adaptasi manusia di dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Georg Simmel menggambarkan kecenderungan ini dengan jelas.

*... that objectives culture develops in a degree and tempo which leaves farther and farther behind the cultivation of subjects, which alone provides meaning for all perfections of objects; that the individual branches of culture grow apart in divergent directions and mutual alienation, such as that the totality of culture hastens toward the fate of the tower of Babel and its deepest value, which exists precisely in the coherence of its parts, seems threatened with its annihilation...* (dikutip dalam Levine, 1991:109).

Pandangan Simmel tersebut dapat ditanggapi sebagai suatu peringatan terhadap tragedi modernitas, di mana formalisasi kehidupan dan keterasingan manusia merupakan ujung lain dari evolusi peradaban.

Melihat kenyataan bahwa proses konsumsi telah mempengaruhi pembentukan tata nilai yang menjadi alat ukur dominan dalam pembentukan status dan identitas, kebudayaan lokal sesungguhnya sedang kehilangan pengaruhnya. Di dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat konsumen sekarang ini, fungsi kebudayaan lokal sebagai referensi tradisional mulai melemah. Satu-satunya yang dapat dilakukan sebenarnya adalah memperkuat kedudukan kebudayaan dan mengintensifkan fungsi kebudayaan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga kebudayaan asli tidak hanya dipahami oleh generasi tua.

### Skenario Perkembangan Kebudayaan

Paparan bagian-bagian sebelumnya menegaskan bahwa proses transformasi terjadi disebabkan oleh empat faktor.<sup>4</sup>

Pertama, karena masuknya kebudayaan luar yang mengubah tata nilai, antara lain disebabkan oleh proses komunikasi global. Kedua, kreativitas internal yang membentuk inovasi intelektual dan ditandai dengan penemuan-penemuan baru dalam kehidupan. Ketiga, tekanan dari luar yang terlihat dalam proses migrasi, teknologi baru, dan perdagangan. Keempat, perubahan dari dalam, berupa inovasi teknologi yang selain memberikan kemudahan-mudahan bagi kehidupan manusia juga berfungsi dalam memaksakan suatu praktik kehidupan baru yang sesuai dengan teknologi yang dihasilkan.

Meskipun dapat dilihat dengan jelas bahwa faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang berbeda satu sama lain dalam mempengaruhi perubahan suatu masyarakat, kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan. Bahkan, interaksi antara kekuatan eksternal dan internal menentukan corak perubahan suatu masyarakat. Dalam konteks ini pula sangat menarik untuk dilihat bagaimana kekuatan internal masih mampu menjadi filter di dalam setiap proses transformasi sehingga tidak menghasilkan apa yang disebutkan Soedjatmoko sebagai "eklektik murahan". Bagi saya, jalan yang paling penting dilakukan adalah melakukan reproduksi kebudayaan sehingga kebudayaan lokal dapat mengevaluasi setiap proses perubahan untuk mengarahkan perubahan ke arah yang menguntungkan manusia secara utuh. Untuk itu, dukungan berbagai institusi merupakan prasyarat penting di dalam reproduksi kebudayaan, khususnya dengan melakukan pengembangan dan pembinaan kebudayaan secara lebih ekspansif.

Sejalan dengan persoalan tersebut, perlu disusun skenario yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan transformasi pada abad berikutnya.

Di dalam usaha membangun dasar yang kokoh bagi usaha pembangunan manusia

4. Penjelasan rinci mengenai penyebab transformasi ini lihat Anthony Smith (1973) dalam kritiknya terhadap teori perubahan sosial kaum fungsionalis.

dan masyarakat Indonesia ke fase berikutnya, dibutuhkan suatu proses transformasi kebudayaan sehingga kebudayaan kita mampu menjadi pendukung. Dalam hal ini, kebudayaan harus berfungsi sebagai infrastruktur yang membuka jalan bagi proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial secara umum. Untuk itu, perlu dilakukan intensifikasi kebudayaan dengan cara perumusan kebudayaan menjadi filsafat sosial yang mempengaruhi semangat kerja dan sikap-sikap hidup yang berorientasi kepada kemajuan. Aspek yang paling lemah adalah kelembagaan karena kurangnya lembaga yang memperhatikan proses intensifikasi kebudayaan secara luas.

Untuk mengatasi berbagai kecenderungan masa kini, haruslah dirumuskan suatu kebudayaan tandingan yang berfungsi mengendalikan dominasi peranan pasar di dalam pembentukan tata nilai baru di dalam masyarakat. Kebudayaan yang mengakar harus menjadi sumber inspirasi bagi setiap individu di dalam praktik kehidupannya sehingga dapat menjadi referensi utama bagi setiap persoalan yang dihadapi. Untuk itu, kebudayaan harus diproduksi dan direproduksi di pusat-pusat tertentu dan disebarluaskan ke berbagai tempat. Wacana kebudayaan melalui berbagai saluran perlu diintensifkan dan usaha mengaktifkan kembali lembaga-lembaga kebudayaan merupakan prasyarat penting karena dari sinilah ide-ide kebudayaan dipancarkan. Selain lembaga-lembaga pendukung, sangat dibutuhkan lembaga yang benar-benar bergerak dalam bidang studi dan penelitian kebudayaan dan mempengaruhi wacana kebudayaan untuk menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Usaha produksi dan reproduksi kebudayaan merupakan hal yang sangat relevan dilakukan sekarang ini karena kebudayaan merupakan kunci untuk membuka jalan menuju masyarakat global. Hambatan proses tersebut selama ini muncul karena transformasi kebudayaan itu tidak ber-

langsung dengan baik sehingga ciri-ciri feodal masyarakat kita masih sangat kuat. Feodalisme misalnya, menjiwai kebudayaan ekonomi dan politik. Modernisasi ekonomi tidak dapat terjadi dengan cepat jika ketimpangan-ketimpangan hubungan kerja dan aliansi-aliansi dagang yang melemahkan ekonomi rakyat tidak mengalami perbaikan. Kebebasan-kebebasan yang dikembangkan pemerintah selama ini tetap merupakan peluang bagi sebagian orang, bukan bagi banyak orang. Kebudayaan politik yang masih bersifat "tuntas" telah menyebabkan proses birokrasi berarti "pelayanan dari bawah", di mana masyarakat merupakan pihak yang melayani kepentingan golongan atas. Dalam iklim semacam ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak memiliki fungsi yang tepat karena perangkat kelembagaan yang mengatur hak-hak manusia di dalam proses pembangunan (untuk manusia) tidak tersedia. Partisipasi masyarakat dalam proses semacam ini bersifat pasif.

Untuk itulah proses transformasi kebudayaan secara mendasar harus terjadi, mengingat kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini di dalam setiap proses pembangunan sesungguhnya disebabkan oleh kecenderungan dalam mengesampingkan nilai-nilai kebudayaan, terutama dengan melihat proses perubahan ekonomi sebagai proses yang terpisah dari perubahan sosial dan budaya secara umum. Padahal, persoalan kita bukanlah persoalan ekonomi dan teknologi semata-mata. Persoalan kita sesungguhnya dimulai dari persoalan salah urus, salah mengadili, salah bunuh, salah pukul, sampai kepada korupsi, nasib buruh, dan kekerasan. Semua ini merupakan tanda penting bahwa pembangunan yang sedang berlangsung masih belum sesuai dengan cita-cita pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu, pesan Soedjatmoko sangat relevan untuk diingat kembali dan diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi persoalan bangsa secara komprehensif.

## Penutup

Uraian dalam tulisan ini menegaskan suatu keharusan perubahan sudut pandang dalam melihat proses transformasi masyarakat, khususnya menyangkut prasyarat sosial budaya yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan penerapan suatu ide perubahan. Konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural menjadi dasar yang tidak terelakkan untuk dilakukannya suatu rekayasa sosial budaya untuk memberikan jalan bagi proses perubahan yang direncanakan. Konteks multikultural termanifestasi mulai dari penggunaan bahasa yang berbeda, penghayatan keagamaan yang beragam, adat-istiadat yang bervariasi hingga solidaritas kelompok dan golongan yang justru semakin mengkristal dalam kehidupan sosial. Fakta antropologis menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak bisa diabaikan, apalagi dipolitisasi karena seluruh pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan akan menanggung biaya yang sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1994. *The Muslim Businessmen of Jatinom: Religious Reform and Economic Modernization in a Javanese Town*. Disertasi Ph.D., University of Amsterdam.
- Alatas. 1977. *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass & Comp. Inc.
- Alexander, Jennifer & Paul Alexander. 1991. "Protecting Peasants from Capitalism: The Subordination of Javanese Traders by the Colonial State", *Comparative Studies in Society and History* 33 (2): 370-394.
- Alfian. 1982. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Arche, Alberto dan Norman Long. 2000. "Reconfiguring Modernity and Development from an Anthropological Perspective", dalam Alberto Arche dan Norman Long (ed.), *Anthropology, Development and Modernities*. London: Routledge.
- Bellah, R.N. 1992. *Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Boeke, J.H. 1980. "Dualism in Colonial Societies", dalam Hans-Dieter Evers (ed.), *Sociology of South-East Asia: Readings on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm. 26-37.
- Bowen, John. 1986. "On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia", *JAS* 45 (3): 545-556.
- Breman, Jan C. 1982. *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde.
- Castles, Lance. 1967. *Religion, Politics, and Economic Behaviour in Java: The Kudus Cigarette Industry*. Cultural Report Series No. 15, Yale University.
- De Jonge, Huub. 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Drewes, G.W.J. 1967. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia", *BKI* 124 (4): 433-59.
- Effendi, Sofian. 1990. "Pembangunan Kualitas Manusia: Suatu Perspektif Administrasi Negara", dalam Sofian Effendi, Sjafrin Sairin, M. Alwi Dahlan (ed.), *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm. 413-426.
- Effendi, Sofian, Sjafrin Sairin, M. Alwi Dahlan (ed.). 1990. *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm. 413-426.
- Eisenstadt, S.N. 1970. *Readings in Social Evolution and Development*. Oxford: Pergamon Press.
- Evers, Hans-Dieter et al. (ed.). 1994. *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and Developing Markets*. London: Routledge.

- Featherstone, Mike (ed.). 1990. *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publications.
- Foster, G.M. 1973. *Traditional Societies and Technological Change*. New York: Harper & Row.
- Geertz, Clifford. 1963. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. Chicago: The University of Chicago Press.
- . 1967. "Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns: A Case in Point", dalam G. Dalton (ed.), *Tribal and Peasant Economies*. New York: The Natural History Press, hlm. 366-394.
- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya: Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bharata.
- Korten, David. 1988. "Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat: Menuju Suatu Kerangka Kerja", dalam David Korten dan Sjahrir (ed.), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan an Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- . 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Levine, Donald N. 1990. "Simmel as Educator: On individuality and Modern Culture", *Theory, Culture & Society* 8 (3): 169-193.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 1966. *Trade and Islam in the Malay-Indonesian Archipelago*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Muhaimin, Yahya. 1990. "Muslim Traders: The Stillborn Bourgeoisie", *Prisma* 49: 83-90.
- Nair, Kusum. 1966. *Blossoms in the Dust: The Human Factor in Indian Development*. New York: F.A. Praeger.
- Nisbet, Robert. 1972. *Social Change*. New York: Harper & Row.
- Sairin, Sjafrir. 1991. "Dimensi Kebudayaan dalam Pembangunan Pedesaan", makalah Seminar Nasional Optimalisasi Peran Desa sebagai Sumberdaya Potensial dalam Pembangunan Nasional, Universitas Merdeka Malang dan Depdagri, Malang, 6-7 Agustus.
- Simmel, Georg. 1990. "Money in Modern Culture", *Theory, Culture & Society* 8 (3): 17-31.
- Smith, Anthony D. 1973. *The Concept of Social Change: A Critique of the Functionalist Theory of Social Change*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- . 1987. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES
- Van Leur, J.C. 1983. *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. Dordrecht, The Netherlands: Foris Publications.
- Weber, Max. 1930. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York and London: Scribner.
- . 1977. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press (edited by G. Roth and C. Wittich).